

## MODEL-MODEL PEMBIAYAAN PENDIDIKAN (ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI DALAM INSTITUSI PENDIDIKAN)

Mesiono, Roslaeni

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
mesiono@uinsu.ac.id, leniroslaeni78@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep dasar pembiayaan pendidikan dan model-model pembiayaan pendidikan. Metodologi penelitian yang digunakan ialah metode *library research* dengan teknik analisis data deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembiayaan yang efektif dan efisien serta dapat dikembangkan yaitu model *Power Equalizing* dan model *Foundation Plan* karena model *Power Equalizing* dibebankan kepada distrik-distrik yang sangat kaya untuk membayarkan sebagian pajak sekolah yang mereka pungut kembali ke kantong negara bagian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan sekolah dipengaruhi oleh: 1) kenaikan harga (*rising prices*); 2) perubahan relatif dalam gaji guru (*teacher's salaries*); 3) perubahan dalam populasi dan kenaikannya prosentasi anak di sekolah negeri; 4) meningkatnya standar pendidikan (*educational standards*); 5) meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah; dan 6) meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi (*higher education*).

**Kata Kunci:** *Model, Pembiayaan Pendidikan, Lembaga Pendidikan, Pemerintah*

### ABSTRACT

This study aims to describe the basic concepts of education financing and education financing models. The research methodology used is the library research method with analytic descriptive data analysis techniques. The results show that an effective and efficient financing model that can be developed is the *Power Equalizing* model and the *Foundation Plan* model because the *Power Equalizing* model is imposed on very rich districts to pay part of the school taxes they collect back into the state's pocket. The factors that influence the financing of school education are influenced by: 1) rising prices; 2) relative changes in teacher salaries (*teacher's salaries*); 3) changes in population and an increase in the percentage of children in public schools; 4) increasing educational standards; 5) increasing age of children leaving school; and 6) increasing demands for higher education (*higher education*).

**Keywords:** *Model, Education Financing, Educational Institutions, Government*

### PENDAHULUAN

Pembiayaan dalam dunia pendidikan bukanlah hal sederhana. Di negara maju, pembiayaan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Berbeda dari sistem pendidikan di negara maju, negara berkembang memprioritaskan

anggaran daerahnya untuk pembangunan pendidikan dan dilakukan dengan berbagai model pembiayaan yang menguntungkan bagi pembangunan pendidikan di negaranya. Pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah

daerah, dan masyarakat.” Demikian juga Pasal 49 ayat 1 menyatakan lokasi dana pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan 20 persen APBD di luar gaji. Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, dituntut kesungguhan dari para elite politik, para pelaku pendidikan agar mampu mengembangkan sistem pendidikan sehingga lembaga mampu dijadikan penggerak bagi kemajuan daerahnya. Kenyataannya sampai sekarang masih banyak daerah yang belum dapat melaksanakan amanat undang-undang tersebut, dan institusi pendidikan berjalan apa adanya. (Musthafa, 2018).

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola suatu pembiayaan pendidikan diperlukan suatu konsep dan sistem perencanaan yang matang, agar mampu merumuskan sistem pembiayaan nasional. (Barlian, 2016). Semua ini akan sangat dipengaruhi oleh pembiayaan dalam pendidikan, baik tingkat nasional dan daerah. Pembiayaan sebagai salah satu

komponen sistem pendidikan memerlukan kajian pemikiran yang lebih mendalam dan penelitian yang lebih cermat, agar dalam hal pengelolaan pembiayaan pendidikan tepat sasaran dan tidak menyeleweng dari yang telah ditentukan kebijakannya. (Komariah, 2018).

Selain itu pembiayaan pendidikan menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan pendidikan, bahkan tanpa adanya pembiayaan maka kegiatan pendidikan tidak akan terlaksana dengan baik. Bahkan untuk memulai sesuatu kegiatan pun akan sulit. Memang banyak ahli yang mengatakan bahwa pembiayaan bukanlah satu-satunya yang menjadi tolak ukur ketercapaian atau keberhasilan akan tetapi adanya pembiayaan pendidikan menjadi salah satu tolak ukur bukti keseriusan para pengelola pendidikan untuk menjadikan lembaga pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. (Usman, 2017).

Pembiayaan pendidikan tentu memiliki model-model yang perlu

untuk diketahui oleh para pengelola pendidikan. Sehingga menjadi rujukan atau landasan bagi para pengelola dalam menjalankan kegiatan pendidikannya. Model pembiayaan yang dipilih akan menentukan arah dari kebijakan yang ditetapkan oleh pengelola pendidikan. Semakin bijak dalam memilih model, maka akan semakin bijak pula dalam mengambil keputusan, dan menentukan langkah-langkah pengembangan pendidikan. Model pembiayaan tidaklah hanya satu, bahkan jika diperhatikan hampir diseluruh negara memiliki perbedaan ragam dalam model pembiayaan pendidikan. Ada negara yang memang menjadi penanggung jawab penuh terhadap pembiayaan pendidikan, dan ada juga negara yang berbagi dengan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Intinya model ini akan menentukan arah pengembangan institusi pendidikan. (Fadilah, 2020)

Artikel memilih metode penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan

adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu (Hasan, 2008)

Penelitian ini secara khusus akan membahas tentang model-model pembiayaan pendidikan, akan tetapi sebelum membahas itu penelitian ini juga akan membahas konsep dasar dari pembiayaan pendidikan. Penelitian ini tentu diharapkan dapat menjadi acuan kerangka teoritis dalam pengembangan konsep-konsep yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan, dan juga menjadi kerangka acuan praktis bagi para praktisi pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan.

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

### **Pengertian Pembiayaan Pendidikan**

Secara leksikal pembiayaan berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dsb.) sesuatu; ongkos;

belanja. Maka, pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Biaya (*cost*) merupakan salah satu komponen masukan (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. (Penyusun, 2008)

Secara bahasa biaya (*cost*) dapat diartikan sebagai pengeluaran, atau dalam istilah ekonomi berarti biaya/pengeluaran yang berupa uang atau bentuk moneter lainnya. (Hallak, 1985). Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. (Mulyasa, 2004). Dalam hal ini, biaya dapat diartikan sebagai semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan pendidikan erat kaitannya dengan teori ekonomi pendidikan. (Pohan, 2019).

Ekonomi pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan mengenai bagaimana

manusia dan masyarakat memilih, dengan atau tanpa uang, untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka untuk menciptakan berbagai jenis pelatihan, pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, watak, dan lain-lain, terutama melalui sekolah formal dalam suatu jangka waktu dan mendistribusikannya, sekarang dan kelak, di kalangan masyarakat. Konsep biaya dalam bidang pendidikan memberikan pandangan bahwa lembaga pendidikan merupakan produsen jasa pendidikan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang dimiliki seorang lulusan. Lembaga pendidikan memperoleh input berupa sumber daya manusia yang kemudian diproses melalui kegiatan pendidikan dan keterampilan untuk menghasilkan output yang mampu bersaing serta dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja. (Ferdinand, 2013).

Biaya pendidikan merupakan nilai uang dari sumber daya pendidikan yang dibutuhkan untuk

mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, oleh karenanya untuk menghitung biaya pendidikan harus terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya pendidikan termasuk kualifikasi atau spesifikasi dan jumlahnya, untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Pembiayaan Pendidikan mengacu pada pengetahuan atau pemahaman tentang pentingnya uang dan penggunaannya. Secara harfiah pembiayaan pendidikan sebagai penggunaan uang yang bijak. Melek finansial adalah kemampuan untuk memahami keuangan. (Tamam, 2018).

#### **Jenis Pembiayaan Pendidikan**

Pembiayaan pendidikan pada tataran makro (nasional) maupun mikro (sekolah), dikenal beberapa jenis biaya pendidikan yakni biaya langsung (*direct cost*) dan tak langsung (*indirect cost*), biaya pribadi (*private cost*) dan biaya sosial (*social cost*), biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) dan biaya bukan dalam bentuk uang (*non-monetary cost*) (Syahputra & Daryanto, 2018):

Biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*).

Biaya langsung adalah segala bentuk pengeluaran yang secara langsung menunjang dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar mengajar siswa, berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. (Aulia et al., 2017).

Sedangkan biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, misalnya biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan, dan harga kesempatan (*opportunity cost*) Atau dengan kata lain, biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang

dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Biaya pribadi (*private cost*) dan biaya sosial (*social cost*).

Biaya pribadi adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau dikenal juga pengeluaran rumah tangga (*household expenditure*). Biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk pendidikan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain tidak sama, karena dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain : a. Perbedaan antar provinsikabupaten b. Pengeluaran keluarga berdasarkan status sosial c. Pengeluaran keluarga berdasarkan lokasi sekolah d. Pengeluaran keluarga berdasarkan tingkat penghasilan e. Pengeluaran keluarga berdasarkan penampilan fisik sekolah f. Pengeluaran siswa berdasarkan tingkat pendidikan orang tua. Selanjutnya, biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh

pemerintah yang kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya termasuk biaya sosial. (Dwi Atmanti, 2005).

Biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) dan bukan uang (*non-monetary cost*).

Biaya pendidikan menurut sumbernya tergolong atas biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua/wali siswa, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua/ wali siswa, dan lembaga pendidikan itu sendiri. (Musthafa, 2018)

Pemikiran tentang dana pendidikan paling tidak dapat difokuskan pada dana langsung, dana tidak langsung, sumber-sumber dana pendidikan, kriteria kesejahteraan sosial maksimum, kriteria keputusan, dan beberapa masalah dalam analisis keuntungan biaya. Biaya tak langsung sering juga dipandang sebagai biaya pendidikan yang tidak dapat dilihat secara nyata

(*hidden costs*) yang dapat dibedakan menjadi ;

1. Biaya yang seolah-olah hilang karena siswa bersekolah, dibandingkan dengan seandainya bekerja untuk mendapatkan pemasukan (uang).
2. Nilai pengecualian pajak seperti yang umumnya dikenakan pada lembaga-lembaga non-profit (tidak terkecuali lembaga pendidikan).
3. *Inputed costs* depresi dan bunga (dalam hubungannya dengan biaya-biaya gedung dan perlengkapan pendidikan sekolah). (Mulyasa, 2004)

Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini sesuai amanat UUSPN Nomor 20 tahun 2003 Pasal 46 ayat (1). Pembiayaan pendidikan merupakan hubungan saling keterkaitan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang bersifat mikro dan makro pada satuan pendidikan.

Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu: a) peningkatan potensi SDM yang berkualitas; b) penyediaan komponen-komponen sumber-sumber pembiayaan pendidikan; c) penetapan sistem dan mekanisme pengalokasian dana; d) pengefektifan dan pengefisienan penggunaan dana; e) akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) dari aspek keberhasilan dan mudah terukur pada setiap satuan pendidikan; f) meminimalis terjadinya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penggunaan pembiayaan pendidikan. (Prayoga & Risnandi, 2019).

### **Model-Model Pembiayaan**

Sumber pembiayaan pendidikan yang melimpah tidak menjadi jaminan bagi peningkatan mutu, jika tidak direncanakan, salah sasaran, salah pengelolaan, tidak ada pengawasan, akuntabilitas rendah, sanksi yang tidak tegas yang diberikan bagi penyeleweng, sehingga tidak ada efek jera dan

moral yang rendah, dan alasan lainnya dalam pengelolaan biaya pendidikan. (Ferdinandi, 2013). Model manajemen pembiayaan pendidikan di Indonesia sebenarnya merupakan modifikasi dan gabungan dari berbagai model pembiayaan pendidikan di Negara lain di dunia. Model-model pembiayaan pendidikan itu pada prinsipnya memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. (Rida Fironika, 2015).

Terkait dengan model pembiayaan pendidikan, bahwa terdapat 4 (empat) model pembiayaan pendidikan, yaitu: 1) subsidi penuh dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi; 2) pendidikan gratis pendidikan tinggi diberikan kepada peserta didik sampai usia tertentu; 3) pendidikan gratis diberikan sampai SMA, dan pendidikan tinggi tetap membayar SPP sekalipun masih menerima subsidi; dan 4) semua jenjang pendidikan wajib membiayai diri sendiri. Penggalan sumber dana dapat

diperoleh dari upaya kerja sama dengan industri atau memanfaatkan bantuan CSR (*corporate social responsibility*), membentuk komunitas alumni, atau bersumber dari orangtua/wali peserta didik. Berikut ini ada beberapa model pembiayaan pendidikan serta kelebihan dan kekurangannya :

#### Model Dana Bantuan Murni (*Flat Grant Model*)

Merupakan uang bantuan negara yang dibagikan pada sekolah di daerah tanpa memperhitungkan pertimbangan kemampuan pembayaran pajak daerah setempat, yang didasarkan pada jumlah siswa yang harus dididik. Kelebihan model Dana Bantuan Murni (*Flat Grant Model*) adalah : (1) Sekolah dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan pembelajaran siswa (2) Sekolah dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa. Sedangkan kekurangan Model Dana Bantuan Murni (*Flat Grant Model*) adalah: (1) Pemerintah tidak mendapat pajak sebagai sumber devisa negara, (2) Dapat



meningkatkan penyimpangan dana pendidikan, (3) Adanya tingkat kesenjangan antara sekolah di tiap daerah dibandingkan dengan daerah yang makmur. Tujuannya adalah untuk menjaga sekolah dari kehancuran lebih parah (pada daerah yang miskin).

#### Model Landasan Perencanaan (Foundation Plan Model)

Model yang menggambarkan bahwa negara tanpa mempertimbangkan kekayaan & pajak daerah memberikan dana kepada daerah yang miskin lebih banyak untuk setiap siswanya dibandingkan dengan daerah yang makmur. Kelebihan Model Landasan Perencanaan (Foundation Plan Model) adalah: (1) Pengeluaran anggaran pendidikan efektif, efisien dan akuntabilitas, (2) Pemerintah mendapat pajak sebagai sumber devisa Negara. Sedangkan kekurangan Model Landasan Perencanaan (*Foundation Plan Model*) adalah: (1) Sekolah dapat membatasi program kegiatan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, (2) Adanya penyimpangan anggaran tahunan

pendidikan. (Hanafiah, 2020)

#### Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (*Guaranted Tax Base Plan*)

Model ini dibatasi dengan menentukan penafsiran penilaian per siswa yang menjadi jaminan negara diperuntukkan bagi wilayah sekolah setempat. Bantuan negara menjadi berbeda antara apa yang diterima daerah per siswa dengan jaminan negara per siswa. Pembagian persentasenya sangat tinggi di sekolah distrik yang miskin, dan rendah di sekolah distrik yang kaya / sejahtera. Kelebihan Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (*Guaranted Tax Base Plan*) adalah: (1) Jumlah pembiayaan pendidikan akan terperinci, (2) Pemerintah mendapat pajak sebagai sumber devisa Negara. Sedangkan Kekurangan Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (*Guaranted Tax Base Plan*) adalah: (1) Hanya akan efektif dan efisien bagi negara distrik, (2) Terbatasnya pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan Model Persamaan Persentase (*Persentase Equalizing Model*)

Model ini dikembangkan tahun 1920-an, lebih banyak memberikan sumbangan yang dibutuhkan pada tiap murid & guru ke daerah-daerah yang kurang makmur. Dalam program yang sama, jumlah pembayaran yang disetujui dihitung bagi setiap siswa, tiap guru, atau bagian lain yang di butuhkan. Jumlah yang diperlukan berubah-ubah tiap bagian sesuai keperluan. (Lubis et al., 2021). Kelebihan Persamaan Persentase (*Persentase Equalizing Model*) adalah: (1) Sekolah di daerah terpencil memperoleh dana pendidikan besar, (2) Sekolah di daerah terpencil dapat melengkapi sarana dan prasarana sekolah, (3) Adanya persamaan peningkatan mutu pendidikan di tiap daerah. Kekurangan Model Persamaan Persentase (*Persentase Equalizing Model*) adalah (1) Akan menimbulkan penyimpangan pembiayaan pendidikan, (2) pertanggungjawaban dana pendidikan tidak akuntabel dan transparan, Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing*

*Plan*)

Model ini menghendaki distrik yang kaya membayar pajak sekolah yang dikumpulkan kembali ke negara. Selanjutnya negara menggunakan uang dari sekolah distrik yang kaya itu untuk meningkatkan bantuan sekolah pada distrik yang lebih miskin. Kelebihan model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing Plan*) adalah : (1) Adanya persamaan perencanaan kemampuan pembiayaan pendidikan, (2) Sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan Kekurangan Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing Plan*), pemerintah tidak mendapat pajak sebagai sumber devisa negara

Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (*Full State Funding Model*)

Model ini merupakan rencana yang dirancang untuk mengeliminir perbedaan local dalam hal pembelanjaan dan perpajakan. Pendanaan sekolah akan dikumpulkan ditingkat negara dan

diberikan ke sekolah distrik dengan dasar yang sama. Asas keadilan tentang perlakuan terhadap siswa dan pembayar pajak, serta pembiayaan pendidikan berdasarkan tingkat kekayaan yang dimiliki. Untuk menghindari banyaknya anak pada masyarakat miskin meninggalkan pendidikan sehingga muncul masalah pengangguran dan kesejahteraan bagi generasi penerusnya. Kelebihan model Pendanaan Negara Sepenuhnya (Full State Funding Model) adalah: (1) Sekolah dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan pembelajaran siswa, (2) Sekolah dapat meningkatkan sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang pembelajaran siswa, (3) Sekolah dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa. Sedangkan Kekurangan Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (Full State Funding Model) adalah : (1) Anggaran bagi pembiayaan pendidikan relatif besar dalam APBN, (2) Akan timbulnya penyimpangan pembiayaan pendidikan Model Sumber Pembiayaan (*The*

#### *Resources Cost Model*)

Model ini dikembangkan Hambers dan Parrish yang menyediakan suatu proses penentuan pembiayaan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan berbeda dari kondisi ekonomi di setiap daerah. Model ini menurut Sergivanni tidak bersangkutan dengan pendapatan pajak maupun kekayaan suatu daerah. Kelebihan model Sumber Pembiayaan (*The Resources Cost Model*) adalah : (1) Sumber pembiayaan tiap daerah berbeda-beda, (2) Sekolah daerah terpencil dapat meningkatkan mutu pendidikan, (3) Sekolah dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa. Sedangkan Kekurangan Model Sumber Pembiayaan (*The Resources Cost Model*) adalah: (1) Sekolah dapat melakukan pungutan kepada siswa. (2) Adanya kesenjangan sosial tiap daerah

#### Model Surat Bukti / Penerimaan (*Models of Choice and Voucher Plans*)

Model ini memberikan dana untuk pendidikan langsung kepada individu atau institusi rumah tangga

berdasarkan permintaan pendidikan. Mereka diberikan surat bukti penerimaan dana untuk bersekolah melalui sistem voucher yang mencerminkan subsidi langsung kepada pihak yang membutuhkan yaitu murid. Kelebihannya, (1) Negara memberikan pilihan bagi sekolah dan orang tua untuk meningkatkan mutu pendidikan, (2) Sekolah swasta mendapatkan bantuan tambahan dana pendidikan. Sedangkan kekurangan: (1) Adanya kecemburuan sosial diantara sekolah-sekolah negeri, (2) Dapat meningkatkan penyimpangan dana pendidikan

Selain model-model yang disebutkan di atas terdapat juga model pembiayaan pendidikan yang lain yakni: Model Rencana Bobot Siswa (*Weight Student Plan*) adalah model yang mempertimbangkan siswa-siswa berdasarkan proporsinya. Contoh siswa yang cacat, siswa program kejuruan atau siswa yang pandai dua bahasa., Model Berdasarkan Pengalaman (*Historic Funding*) yakni Model ini sering disebut Incrementalism,

dimana biaya yang diterima satu sekolah mengacu pada penerimaan tahun yang lalu, dengan hanya penyesuaian. Model Berdasarkan Usulan (*Bidding Model*), yakni model ini sekolah mengajukan usulan pada sumber dana dengan berbagai acuan, kemudian sumber dana meneliti usulan yang masuk, dan menyesuaikan dengan criteria. Model Berdasarkan Kebijakan (*Discretion Model*), Model ini penyandang dana melakukan studi terlebih dahulu untuk mengetahui komponen-komponen apa yang perlu dibantu berdasarkan prioritas pada suatu tempat dari hasil eksplorasinya. (Arwildayanto et al., 2017). Dari pendapat diatas, penulis berpendapat bahwa sistem pembiayaan di Indonesia memang agaknya sulit merujuk kepada salah satu model karena kondisi tiap sekolah berbeda. Di Indonesia masing-masing elemen seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua murid, dan masyarakat secara ideal harus memberi biaya untuk pendidikan. Ada baiknya beberapa model akan dapat dimodifikasi menjadi sebuah

model yang ideal untuk disesuaikan dengan setting area pendidikan ataupun setting sosial budaya daerah yang cocok untuk Indonesia.

Model pembiayaan pendidikan yang terbaik bagi negara Indonesia (bagi sekolah) adalah gabungan dari model *Power Equalizing* dan model *Foundation Plan* karena model *Power Equalizing* dibebankan kepada distrik-distrik yang sangat kaya untuk membayar sebagian pajak sekolah yang mereka pungut kembali ke kantong negara bagian. Negara bisa menggunakan uang yang dari distrik-distrik kaya untuk menambah bantuan bagi distrik-distrik yang miskin. Setiap daerah akan menerima jumlah dana berbeda tergantung pada kemampuan penghasilan daerah (APBD). Daerah miskin akan menerima 5 per mil ditambah dengan 7 per mil dana dasar daerah. Dengan demikian akan ada keseimbangan dana antar daerah-daerah yang sumber daya alamnya kaya. Dan *Foundation plan*, dirancang untuk menggali empat masalah besar dalam pendidikan

dan keuangan, yaitu: kesetaraan pembelanjaan, penetapan-penetapan standar pajak dan pembelanjaan sekolah minimum, pemisahan (demarkasi) wewenang politik antara distrik-distrik sekolah lokal dengan negara bagian, dan provisi untuk perbaikan berkesinambungan atas proses pendidikan. Para pendukungnya menganggap bahwa negara harus mematok batas-batas minimum dan pemerintah lokal harus diperbolehkan untuk melampaui batas-batas minimum hingga ke tingkatan yang diinginkan mereka lakukan. Cara kerja *foundation plan* adalah, pertama, negara harus menentukan biaya per siswa per tahun bagi program pendidikan yang memuaskan. Kedua, negara harus mematok tarif pajak minimum yang harus diberlakukan oleh semua distrik sekolah. Ketiga, negara memberikan hibah (*grants*) kepada tiap distrik sekolah dengan jumlah yang sama. Sedangkan besarnya bantuan adalah situasional terhadap kekayaan lokal tetapi tidak pada upaya pajak.

Foundation plan membagi kue dengan porsi yang sama, namun distrik-distrik miskin lebih diutamakan. (Aziz, 2017)

Dalam hal ini penulis berpendapat jika model *Power Equalizing* dan model *Foundation Plan* digabungkan dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka akan sangat efektif pembiayaan pendidikan yang ada di Indonesia nantinya. Makin efisien dana pada sistem pendidikan tersebut maka berkurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya, oleh karena itu dengan efisiensi akan lebih banyak tujuan program yang dicapai dengan anggaran yang tersedia. Juga nantinya akan mampu menciptakan keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan akan sumber-sumber pendidikan tercapai tujuan yang tidak mengalami hambatan. Jika pembiayaan pendidikan sudah efektif dan tidak lagi dimonopoli oleh sistem politik pembiayaan pendidikan. Maka insyaallah

Indonesia juga bisa menjadi Negara yang jauh lebih maju, baik dalam pendidikannya maupun dalam ekonominya. Karena apabila pendidikan suatu Negara sudah terealisasi dengan baik. Maka dengan sendirinya ekonomi dari Negara itu juga ikut membaik. Untuk perguruan tinggi, sebaiknya pemerintah juga melakukan: Pertama, pemerintah memberikan subsidi pendidikan tinggi untuk semua mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi. Kedua, perlu adanya subsidi silang dengan menerapkan full-payment kepada keluarga mampu, memberi subsidi penuh kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu, dan subsidi 50% kepada mahasiswa dari keluarga penghasilan menengah. Ketiga, penyediaan pinjaman pendidikan tinggi dengan subsidi bunga kepada keluarga tidak mampu dan keluarga kurang mampu. Jumlah kredit tergantung dari besarnya biaya pendidikan yang dikenakan oleh masing-masing universitas.

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Biaya Pendidikan**

Lembaga pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan, seperti halnya pada bidang usaha lainnya menghadapi masalah yang sama, yaitu dalam hal biaya produksi, tetapi ada beberapa kesulitan khusus mengenai penerapan perhitungan biaya produksi. Produksi pendidikan diartikan sebagai unit pelayanan khusus (*units of specific services*). Unit *output* harus meliputi dimensi waktu, seperti tahun belajar atau jam belajar agar biaya-biaya dalam mempersiapkan *output* dibandingkan *input*. *Input* meliputi barang-barang yang dibeli dan orang-orang yang disewakan untuk menyediakan jasa. Di antara masukan (*input*) yang penting dalam sistem bidang pendidikan ruang, peralatan, buku, material, dan waktu para guru dan karyawan lain. *Output* menjadi hasil tambahan yang diakibatkan oleh suatu kenaikan biaya pendidikan yang diterima di sekolah, sepanjang masukan (*input*) menjadi bagian dari biaya kenaikan. Suatu unsur biaya tambahan, yang ada dalam fungsi

produksi yang terdahulu, menjadi biaya kesempatan dari peserta didik. Analisis mengenai biaya produksi pendidikan pada dasarnya menggunakan model teori “*inputproses- output*” di mana sekolah dipandang sebagai suatu sistem industri jasa. Kita menghadapi suatu kelemahan yang merembes pada fungsi produksi pendidikan, bahwa hubungan antara input sekolah di satu pihak, dan *output* sekolah di lain pihak secara konvensional diukur melalui skor-skor *achievement*.” Dari berbagai pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan sekolah dipengaruhi oleh: 1) kenaikan harga (*rising prices*); 2) perubahan relatif dalam gaji guru (*teacher’s salaries*); 3) perubahan dalam populasi dan kenaikannya prosentasi anak di sekolah negeri; 4) meningkatnya standar pendidikan (*educational standards*); 5) meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah; dan 6) meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi

(*higher education*). (Sopiali, 2018).

## SIMPULAN

Dari pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Jenis biaya pendidikan meliputi: a) biaya langsung (*direct cost*); b) biayatidak langsung (*indirect cost*). Biaya rutin dan pembangunan merupakan bagian dari biaya langsung (*direct cost*); c) biaya pribadi (*private cost*); d) biaya masyarakat (*social cost*); e) *monetary cost*; dan f) *non monetary cost*. Jenis biaya yang masih sering dikeluhkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua peserta didik (biaya pribadi). Model pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien serta dapat dikembangkan yaitu model *Power Equalizing* dan model *Foundation Plan* karena model *Power Equalizing* dibebankan kepada distrik-distrik yang sangat kaya untuk membayarkan sebagian pajak sekolah yang mereka pungut kembali ke kantong negara bagian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan sekolah dipengaruhi oleh: 1) kenaikan harga (*rising prices*); 2) perubahan relatif dalam gaji guru (*teacher's salaries*); 3) perubahan dalam populasi dan kenaikannya prosentasi anak di sekolah negeri; 4) meningkatnya standar pendidikan (*educational standards*); 5) meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah; dan 6) meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi (*higher education*). Permasalahan pendidikan nasional tak pernah usai. Lebih khusus lagi jika menyangkut masalah pembiayaan pendidikan, siapa pun mengakui makin mahalny biaya untuk memasuki jenjang pendidikan saat ini. Memang tidaklah salah jika dikatakan pendidikan bermutu membutuhkan biaya. Namun persoalannya, daya finansial sebagian masyarakat di negeri ini masih belum memadai akibat sumber pendapatan yang tak pasti.

## DAFTAR PUSTAKA

Arwildayanto, A., Nina, L., & Warni, T. S. (2017).



- Manajemen Keuangan dan pembiayaan pendidikan*. Widya Padjadjaran.
- Aulia, D., Ayu, S. F., & Nefonafartilova, N. (2017). Analisis Perbandingan Biaya Langsung (Direct Cost) dan Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost) pada Pasien Stroke Di Rumah Sakit. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 2(2).
- Aziz, M. (2017). Pembiayaan dan Efisiensi Pendidikan. *Ijtimaiyah Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya*, 1(2).
- Barlian, U. C. (2016). Kebijakan Pengelolaan Dana Pendidikan Tingkat Sekolah dalam Konteks Otonomi Daerah. *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(2), 69-86. [http://jurnal.upi.edu/manajerial/view/2681/Kebijakan Pengelolaan Dana Pendidikan Tingkat Sekolah dalam Konteks Otonomi Daerah](http://jurnal.upi.edu/manajerial/view/2681/Kebijakan_Pengelolaan_Dana_Pendidikan_Tingkat_Sekolah_dalam_Konteks_Otonomi_Daerah)
- Dwi Atmanti, H. (2005). Investasi sumber daya manusia melalui pendidikan. *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*, 2(Nomor 1), 30-39.
- Fadilah, N. (2020). Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Mts Pakis Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. *Hijri*, 9(1), 1-19.
- Ferdi, W. P. (2013). Pembiayaan pendidikan: Suatu kajian teoritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 565-578.
- <http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/310>
- Hallak, J. (1985). *Analisis biaya dan pengeluaran untuk pendidikan*. Bhratara Karya Aksara.
- Hanafiah, M. A. (2020). Peran Kepala Sekolah/Madrasah Dalam Menjaga Mutu Pendidikan Pada Masa Tersebaranya Virus Corona (Covid-19). *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 13(2), 119-123. <http://jurnal.staiserdanglubukpakam.ac.id/index.php/alfikru/article/view/15>
- Hasan, I. (2008). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Bumi Aksara.
- Komariah, N. (2018). Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan. *Al-Afkar: Jurnal Keislaman & Peradaban*, 6(1), 67-94. <https://doi.org/10.32520/afkar.v6i1.192>
- Lubis, R. R., Ramli, M., Siregar, J., & Panjaitan, R. W. (2021). Analisis Kompetensi Profesional Guru dalam Meningkatkan Keefektifan Belajar Selama Pembelajaran Jarak Jauh. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 14(1), 32-47. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v14i1.37>
- Mulyasa, E. (2004). *Manajemen berbasis sekolah: konsep, strategi dan implementasi*. Remaja Rosdakarya.

- Musthafa, L. A.-H. (2018). Model Pembiayaan Pendidikan Madrasah Aliyah Swasta (Studi Di Madrasah Aliyah Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut). *JIE (Journal of Islamic Education)*, 2(2), 221-248.
- Penyusun, T. (2008). Kamus besar bahasa Indonesia. In *Jakarta: Balai Pustaka*.
- Pohan, R. (2019). Pengaruh Iklim Kerja dan Motivasi Berprestasi terhadap Kinerja Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Pekanbaru. *AL-USWAH: Jurnal Riset Dan Kajian Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 1-22.  
<http://dx.doi.org/10.24014/au.v2i1.6680>.
- Prayoga, A., & Risnandi, A. (2019). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 3(2), 117-131.
- Rida Fironika, K. (2015). Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar UNISSULA*, 2(1), 44.
- Sopiali, A. A. (2018). Teori Dan Konsep Dasar Pembiayaan (Cost) Dalam Pendidikan Islam (Rencana, Organisasi, Pelaksanaan, dan Pengawasan). *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 103-118.
- Syahputra, M. R., & Daryanto, E. (2018). Pembiayaan Pendidikan (Mts Islamiyah Ypi Batangkuis Kab. Deli Serdang). *EducanduM*, 11(2).
- Tamam, B. (2018). Reorientasi Pendanaan Pendidikan Dalam Membangun Mutu Sekolah. *Misykat Al-Anwar*, 29(2), 257189.
- Usman, J. (2017). Urgensi Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 219-246.